

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sudah menghasilkan berbagai perubahan. Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga menjadi faktor dalam mempercepat proses pembangunan di daerah-daerah. Selain itu, perubahan-perubahan yang terjadi juga dipercepat dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih di era desentralisasi.¹

Di bidang pembangunan administrasi, misalnya, penerapan teknologi membawa banyak perubahan yang berhasil meningkatkan kinerja pemerintah seperti melakukan kegiatan pekerjaan sehari-hari dan juga dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Begitu juga dengan masyarakat, masyarakat menjadi lebih mudah dalam memperoleh informasi dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih tersebut tanpa harus pergi ke instansi-instansi, dan tentunya ini dapat menghemat baik dari segi waktu, biaya dan juga tenaga.²

Beberapa penerapan sistem elektronik di birokrasi yang berlandaskan pada kebijakan publik bertujuan untuk menertibkan dan melanjutkan kualitas reformas birokrasi, misalnya penerapan sistem E-Government, E-Budgeting, E-KTP, EKinerja dan lain sebagainya yang berbasis elektronik. Semua itu diterapkan guna memudahkan akses dalam mencari informasi dan registrasi administrasi. Selain itu juga untuk mengurangi terjadinya praktik KKN ditubuh birokrasi. Wujudny pemerintahan yang baik sesuai tuntutan masyarakat, diperlukan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan

¹ M. S. Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anawar, "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 8321–32.

² Irfan Setiawan et al., "Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia" 14, no. 2 (2024): 234–48.

akuntabel serta dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat.³

Diharapkan seluruh ASN Kota Cirebon dapat semakin meningkatkan diri, karena prestasi bisa dicapai hanya dengan kerja keras, dedikasi dan komitmen. Pemerintah Kota Cirebon perlu mempersiapkan SDM-Aparatur yang mempunyai wawasan luas dan pola pikir yang dinamis dan bertanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan oleh instansinya dalam upaya meningkatkan pembangunan yang dapat menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon saat ini sedang membangun dan mengembangkan Aplikasi E-Kinerja yang berhubungan dengan pembayaran tunjangan berbasis kinerja dan akan sampai pada promosi jabatan pada akhirnya. Aplikasi ini dirancang untuk dapat mengontrol program kerja yang dilakukan setiap ASN mulai dari absensi hingga sasaran dan laporan hasil kerja pegawai setiap bulan setiap tahun. E-kinerja ASN berbasis jaringan merupakan upaya penyediaan informasi mengenai disiplin dan kinerja pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan yang dilakukan oleh Tim pengembangan aplikasi DKIS Kota Cirebon, direncanakan akan digulirkan akhir Tahun 2019.⁴

Berdasarkan pengamatan awal penulis, dalam penerapan kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kota Cirebon tidak semuanya berjalan dengan lancar dan maksimal, ada beberapa masalah ataupun kendala yang terjadi pada saat implementasi kebijakan e-kinerja. Kendala yang terjadi, seperti melaporkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para pegawai. Melaporkan hasil pekerjaan dengan menggunakan sistem elektronik tidak semua pegawai bisa menggunakannya, ada juga pegawai yang gagap akan teknologi salah satunya dikarenakan faktor usia dan sulit untuk beradaptasi dengan hal baru yang berbasis elektronik.

³ Agus Tiwar, *“Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desamenggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqih Siyasaah (Skripsi UIN Suska Riau, 2023), 2023.*

⁴ Andhi Nur Rahmadii, Universitas Panca, and Marga Probolinggo, *“KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN”* 11, no. 1 (2023): 35–40.

Sebelum lahirnya kebijakan e-kinerja, pengukuran kinerja pegawai dilakukan dengan menggunakan sistem manual yaitu DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), seiring dengan perkembangan zaman, penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan DP3 sudah tidak relevan lagi.⁵

Terkait dengan pemberian tunjangan kerja pegawai, para pegawai yang bekerja dengan posisi yang sama, pemberian tunjangan kepada para pegawai yang rajin dalam bekerja dan yang pegawai malas dalam bekerja diberikan dengan jumlah yang sama. Hal ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antar pegawai dan akhirnya para pegawai yang tadinya rajin dalam bekerja menjadi malas bekerja karena kesamaan jumlah tunjangan kerja yang diberikan. Dengan lahirnya kebijakan e-kinerja, pemberian tunjangan kinerja pada pegawai menjadi lebih adil, dengan posisi kerja yang sama, pegawai yang rajin bekerja dan yang malas bekerja tunjangan yang diberikan tidak lagi sama karena pemberian tunjangan dilihat berdasarkan kinerja para pegawai melalui e-kinerja. Kebijakan e-kinerja ini menjadi motivasi bagi para pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dan membuat pegawai yang tadinya malas dalam bekerja menjadi lebih rajin dalam bekerja dan memiliki daya saing yang tinggi.⁶

Kebijakan e-kinerja juga berfungsi untuk memantau aktivitas para pegawai pada jam kerja, apakah pegawai tersebut ada melakukan kegiatan atau tidak. Hal ini akan diketahui oleh tim pemeriksa laporan kerja pegawai yang dilakukan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu dan bahkan setiap hari. Penerapan e-kinerja ini merupakan salah satu langkah dan proses perbaikan kinerja bagi para pegawai dilingkungan pemerintahan Kota Cirebon menjadi lebih baik⁷

Kebijakan e-kinerja ini kemudian diimplementasi agar para pegawai secara tidak langsung lebih bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya masing-masing tanpa harus ada perintah dari atasan.

⁵ Supriyanta Supriyanta, “Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah,” *Cakrawala* 2, no. 1 (2018): 50–68, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v2i1.85>.

⁶ Jurnal Transformative, “Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) Di Kota Makassar” 10, no. 2 (2024): 197–219, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2024.010.02.3>.

⁷ Fahri Rozani Ghofar, Sri Andrianti Muin, and Nurmadhani Fitri Suyuti, “YUME : Journal of Management Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara” 7, no. 3 (2024): 1523–40.

Disamping itu, eksekutif dan legislatif merupakan aktor dan memiliki pengaruh besar dalam kebijakan publik, Oleh karena itu, mulai dari merumuskan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan tahap evaluasi kebijakan, para aktor tersebut memiliki peran yang begitu penting, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinan yang baik maka kebijakan publik akan sia-sia.⁸

Oleh karena itu, kebijakan yang diambil dari para aktor kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di publik dan juga membawa perubahan pada sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Mengikuti gagasan dikotomi politik-administrasi, lembaga yang paling otokratif untuk mengimplementasikan kebijakan adalah eksekutif atau pemerintah. Sesuai dengan pembagian tugas yang secara luas diakui maka tugas lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah merumuskan kebijakan. Setelah kebijakan diambil maka tugas eksekutif adalah menjalankan kebijakan tersebut dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disepakati⁹.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari proses administrasi, proses yang digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat

Implementasi juga merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala polic output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Menurut Meter dan Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan¹⁰.

⁸ Lita Sari, Yunita Sari, and Yetty Oktarina, "Analisis Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E- Kinerja Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu" 10, no. 2 (2024): 312–25.

⁹ Hilmy, "Progress Report Laporan Penelitian Implementasi Good University Governance (GUG) Dalam Meningkatkan Kinerja," 2022.

¹⁰ Ghofar, Muin, and Suyuti, "YUME : Journal of Management Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara."

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “**Implementasi Kebijakan E-Kinerja Di Sekretariat Daerah Kota Cirebon Berdasarkan Hukum Tata Negara**”. Yang mana pada penelitian ini penulis akan berfokus tentang dampak dan tanggapan dari pegawai terhadap penerapan E-Kinerja ini.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Administrasi Negara.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan E-kinerja Di Sekretariat Daerah Kota Cirebon

c. Jenis Masalah

Kurangnya Penerapan E-kinerja Di Sekretariat Daerah sehingga tidak tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi masalah penelitian dan juga variabelnya. Oleh karena itu, lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Sekretariat Daerah Kota Cirebon memiliki Sembilan bagian yang masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda-beda. Penulis hanya mengambil salah satu dari sembilan bagian tersebut. Bagian yang penulis ambil adalah bagian organisasi, karena kebijakan e-kinerja terdapat dibagian tersebut. Penulis hanya melihat bagaimana implementasi kebijakan dan proses pada awal penerapan kebijakan e-kinerja.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kota Cirebon?

- b. Bagaimana tanggapan pegawai Sekretariat Daerah Kota Cirebon terhadap kebijakan e-kinerja?
- c. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan e-kinerja dalam perspektif Fikih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Cirebon.
2. Untuk mengetahui apa tanggapan dari para pegawai terhadap implementasi kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan e-kinerja dalam perspektif Fikih Siyasah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi perkembangan ilmu administrasi dan perkembangan ilmu tentang kebijakan publik, dan juga dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri. dan juga bermanfaat bagi masyarakat tentang pentingnya kebijakan publik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik.

2. Secara Praktis

Secara langsung melalui penelitian ini pemerintah diharapkan mampu menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pegawai dan lebih menguatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai di era otonomi daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan ditulis oleh Putri dkk, 2014 “Pengaruh Penerapan E-Kinerja Dan Penghargaan (*Reward*) Terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon”. Dalam penelitian ini di katakana bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-kinerja dan penghargaan terhadap kinerja aparatur pengelelola keuangan daerah.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-kinerja dan penghargaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang relevan lain juga lakukan oleh Diva Riza Fahlefi, 2016 " Upaya Peningkatan Kinerja Di Pemerintah Kota Semarang Melalui Program E-Kinerja Dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)". Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memberikan suatu gagasan baru mengenai tunjangan yang didapatkan pegawai. Untuk membantu terlaksananya produktivitas pegawai berbasis kinerja, Pemerintah membuat suatu program yang dapat memasukkan data-data yang telah pegawai kerjakan melalui e-kinerja, sedangkan untuk Tambahan Penghasilan penilaian yang diberikan dari data hands key tiap pegawai dengan penilaian absensi pegawai, disiplin tidaknya pegwai masuk dan pulang kerja, serta sering mangkir tidaknya pegawai dalam bekerja. Dari data-data itulah yang nantinya dibuat menjadi uang kinerja dan Tambahan Pengasilan Pegawai. Disini dijelaskan mulai dari mekanisme, e-kinerja, mekanisme TPP, sampai Dampak dari penggajian berbasis kinerja melalui ekinerja dan TPP.¹²

¹¹ Wahyu Hanie Pratiwi, “Pengawasan Kinerja Birokrasi Melalui E-Kinerja Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang,” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2018): 271–80, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/20239>.

¹² Diva Riza Fahlefi, “UPAYA PENINGKATAN KINERJA DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM E-KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP),” *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)* 8, no. 1 (2016).

Penelitian yang relevan lain juga ditulis oleh Pratiwi, 2018 “Pengawasan Kinerja Birokrasi Melalui E-Kinerja Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang ” .Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan kinerja birokrasi melalui e-Kinerja di Kota Semarang berhasil diwujudkan dan mampu merombak kinerja buruk PNS Kota Semarang ke arah yang lebih baik, terlebih dalam kaitannya langsung dengan pelayanan publik di Kota Semarang. E-kinerja mampu memaksa kinerja aparatur menjadi lebih disiplin, bertanggungjawab dan bekerja sesuai dengan kegiatan kerjanya masing-masing. Keterpaksaan ini membawa dampak positif bagi kerja Pemerintah Kota Semarang dimata nasional. Keterpaksaan ini mengarahkan PNS di Kota Semarang untuk menjadi abdi negara yang mampu bersaing secara sehat, disiplin, bertanggungjawab dan mampu mengerjakan kegiatan kerjanya dengan baik

Adapun hambatan yang dihadapi adalah: SDM Aparatur yang tidak semuanya masih berusia muda. Aparatur Sipil Negara di Kota Semarang banyak pula yang berusia lanjut. Hal ini menjadi hambatan terbesar dikarenakan faktor usia. PNS yang telah berusia lanjut bahkan telah memasuki usia pensiun biasanya enggan dan acuh untuk mempelajari hal-hal yang baru, terutama dalam bidang teknologi. Tingkat Pendidikan yang merupakan hambatan lain yang dihadapi BKD Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang karena tidak semua PNS memiliki jenjang pendidikan tinggi dan mampu memahami perangkat digital.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴ Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian

¹³ Pratiwi, “Pengawasan Kinerja Birokrasi Melalui E-Kinerja Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang.”

¹⁴ S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁵ Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dengan diterapkannya kebijakan e-kinerja. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia, dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh, dan dengan demikian peneliti tidak menganalisis angka-angka.¹⁶ Setidaknya ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi (ethnography), studi kasus (case studies), studi dokumen/teks (document studies), observasi alami (natural observation), wawancara terpusat (focused interviews), fenomenologi (phenomenology), grounded theory, studi sejarah (historical research).

¹⁵ and Sri Iswati Anshori, Muslich, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1* (Airlangga University Press, 2019).

¹⁶ Kuswandini et al., "Bab 1 Pendahuluan," *Pelayanan Kesehatan* 2016, no. 2014 (2019): 1–6, http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf.

Penulis menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan dan berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti juga dapat mendengar bagaimana pendapat dari para pegawai dengan diterapkannya kebijakan e-kinerja.

3. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber aslinya yang berupa undang undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat¹⁷

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumber primer berupa jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku buku hukum. Serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dan opini opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang di perlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yang nyata, maka teknik pengumpulan data yang nyata, maka teknik

¹⁷ Muh Yani Balaka, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.

pengumpul data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode :

a. Metode Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengancara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Merujuk dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun Penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian, narasumber dalam penulisan hukum.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Dokumentasi merupakan sebuah catatan yang lampau. Dokumentasi dapat bentuk buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dalam menggali data dalam penelitian selain menggunakan metode wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menambah data didapat melalui wawancara serta observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dapat digunakan misalnya catatan dan alat rekaman serta dokumentasi berupa gambar.

5. Teknik Analisis Data

teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya di sistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang logis, bersifat ilmiah, dan mudah dipahami. Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, antaranya sebagai berikut:

Bab Pertama Bagian Pendahuluan. Yakni merupakan gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Teori. Berisikan: teori-teori yang akan dibahas meliputi: pertama, Pengertian Asas asas *Good Governance* dalam perspektif Hukum Positif. Kedua, Pengertian Asas asas *Good Governance* dalam perspektif Fiqih Siyasah, ketiga, Asas asas *Good Governance* Transparansi.

Bab Ketiga merupakan Gambaran Umum Objek Penelitian. Gambaran umum wilayah penelitian merupakan aspek spasial (berkenaan ruang dan tempat) dalam suatu penelitian, karena menyangkut wilayah daerah tertentu yang menjadi ruang dan tempat adanya suatu aturan (hukum) tertentu dalam suatu wilayah. yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode pendekatan.

Bab Ke Empat ialah Analisis. Analisis terkait Implementasi Asas Asas Umum *Good Governance* Pada Pemerintahan Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Studi Transparansi. Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) Bagaimana penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Perspektif Siyasah. 2) Apa Kendala dan Solusi dalam penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bab Kelima Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini. Penutup adalah kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan laporan tugas akhir serta saran yang disampaikan oleh penulis untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem agar lebih baik lagi.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**